

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT  
PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (*CESSIE*) YANG DILAKUKAN  
OLEH BANK SEBAGAI KREDITUR DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 50/PDT.G/2020/PN. BKS)**

Oleh

**Yekky Simamora<sup>1</sup> dan Alfatika Aunuriella Dini<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Pengalihan piutang yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan metode *cessie* mengakibatkan turut serta beralih hak dan kewajiban bank dalam perjanjian Kredit kepada kreditur lain yang menerima peralihan piutang, dan dicantumkannya klausula pengalihan piutang secara *cessie* merupakan kategori klausula yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU perlindungan Konsumen.

penelitian yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan penelusuran kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan menggunakan Analisa kualitatif.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa klausula terkait peralihan piutang lewat metode secara *cessie* dalam perjanjian kredit termasuk ke dalam bentuk klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dan mengakibatkan beralihnya tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen. Putusan Perkara No. 50/Pdt.G/2020/PN. Bks. yang membatalkan Akta Peralihan Piutang (*cessie*) namun tidak membatalkan Perjanjian Kredit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini adalah OJK selaku pengawas Lembaga Keuangan Perbankan dalam menilai perjanjian standar bank dalam memberikan kredit serta peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengelolaan kredit agar dapat memberikan perlindungan hukum baik itu secara preventif dan Represif.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Peralihan Piutang, Hak dan kewajiban.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S-2 Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta  
([yekky.simamora@mail.ugm.ac.id](mailto:yekky.simamora@mail.ugm.ac.id))

<sup>2</sup> Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
([alfatikaadini@ugm.ac.id](mailto:alfatikaadini@ugm.ac.id))

**LEGAL PROTECTION TO DEBTOR IN RELATION TO  
A CESSIE MADE BY BANK AS CREDITOR VIEWED FROM LAW ON  
CONSUMER PROTECTION (CASE STUDY OF BEKASI DISTRICT  
COURT'S DECISION NO. 50/PDT.G/2020/PN. BKS)**

By  
**Yekky Simamora<sup>3</sup> and Alfatika Aunuriella Dini<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

Any transfer of receivables that arises from a Credit Agreement by *cessie method* results in the switched bank's rights and obligations in the Credit Agreement to another creditor who receives the transfer of receivables and the inclusion of receivables transferring clause by *cessie* constitutes a prohibited category of clause as set forth in Article 18 paragraphs (1) and (2) of Law on consumers' protection. The study conducted was by applying normative judicial study method by a bibliographical tracing which was then analyzed by using qualitative analysis. Based on the study it could be concluded that any clause in relation to receivables transfer by *cessie method in a credit agreement* is included in the form of exonerative clause as set forth in Article 18 paragraph (2) of Law on consumers' protection and results in the switch of entrepreneur's liability as set forth in Article 18 paragraph (1) of Law on consumers' protection. The decision on Case No. 50/Pdt.G/2020/PN. Bks. which cancelled Deed of Receivables Transfer (*cessie*) but not cancelling the Credit agreement is consistent with the provisions in Article 18 paragraph (3) of Law on consumers' protection. In respect of said matter, it is needed a supervision from the government, in this matter OJK as the supervisor of Banking Financial Institution in assessing any bank's standard agreement in granting credits as well as the statutory regulation that regulates on credit management so that it can be provided a legal protection both in preventive and repressive aspects.

*Keywords: Consumers protection, the transfer of receivables, rights and obligations*

---

<sup>3</sup> Student of Masters Program (S-2) in Business Law, Gadjah Mada University, Jakarta Campus  
([yekky.simamora@mail.ugm.ac.id](mailto:yekky.simamora@mail.ugm.ac.id))

<sup>4</sup> Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta ([alfatikaadini@ugm.ac.id](mailto:alfatikaadini@ugm.ac.id))